

**Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

JURNAL PENELITIAN



Oleh :

Nama : Rif'at Arifur Rochman

Nomor Mahasiswa : 14313269

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENGESAHAN JURNAL PENELITIAN**

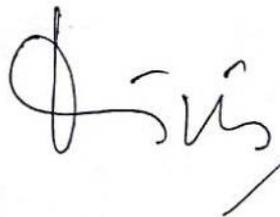
Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : Rif'at Arifur Rochman  
Nomor Mahasiswa : 14313269  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

**Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Rif'at Arifur Rochman

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia  
rifatafr@gmail.com

**ABSTRAK**

Pertumbuhan Ekonomi Nasional suatu negara bisa dilihat dari pembangunan manusia di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, kemiskinan, dan belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) jenis data *time series* tahun 2011-2016 dan data *cross section* dengan cakupan wilayah 21 kabupaten/kota namun kabupaten Malaka tidak diikutsertakan karena baru terbentuk tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

**Kata Kunci** : *Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan, kemiskinan, Belanja Modal.*

## **Determinant of Human Development Index in district/city of East Nusa Tenggara**

Rifat Arifur Rochman

Economics, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia  
rifatafr@gmail.com

### **ABSTRACT**

National Economic Growth of a country can be seen from human development in the country. This study uses a quantitative approach. This study uses government expenditure variables in education, government spending on health, poverty, and capital expenditure. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB) type of time series data in 2011-2016 and cross section data with 21 districts / municipalities. But, Malaka district is not included because it was formed in 2013. The research method used fixed effect model. The results showed that government education expenditures, government health expenditure and capital expenditure had a significant effect on human development index, while poverty had no effect on human development index.

**Keyword** : *Human Development Index, Government Education Expenditure, Government Health Expenditure, Poverty, Capital Expenditure*

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat (Todaro, 2006).

*United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan formula *human development index* (HDI) atau dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga komponennya yaitu lamanya hidup (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf pada usia lima belas tahun keatas), dan tingkat daya beli masyarakat (*purchasing power parity*).

Indonesia dengan kategori negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengupayakan pembangunan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Namun untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur apabila dilihat dari laporan pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2016, Indonesia menempati urutan 113 dari 188 negara di seluruh dunia, dengan nilai sebesar 0,689 kategori menengah, masih kurang baik dibandingkan dengan negara Malaysia yang menempati urutan 59 dengan nilai 0,789.

Indonesia terbagi menjadi 34 Provinsi yang tersebar di seluruh wilayahnya dengan salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) provinsi yang berada di tenggara Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. NTT merupakan provinsi yang mempunyai banyak pulau total ada 566 pulau besar dan kecil dan mempunyai potensi pariwisata yang sangat banyak, kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi NTT marius ardu jelamu mengatakan bahwa awal tahun 2016 hingga juli tercatat sebanyak 14.000 wisatawan mancanegara yang mengunjungi provinsi NTT naik 15 persen dibandingkan jumlah kunjungan pada januari 2015.

Namun apakah dengan berkembangnya pariwisata di NTT dapat mensejahterakan masyarakatnya, bila dilihat dari rekapan indeks pembangunan manusia tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Bada Pusat Statistik (BPS) seluruh provinsi di Indonesia, provinsi NTT menempati urutan ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia, yang artinya belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya pembangunan manusianya.

**Tabel IPM di Provinsi Tenggara Indonesia**

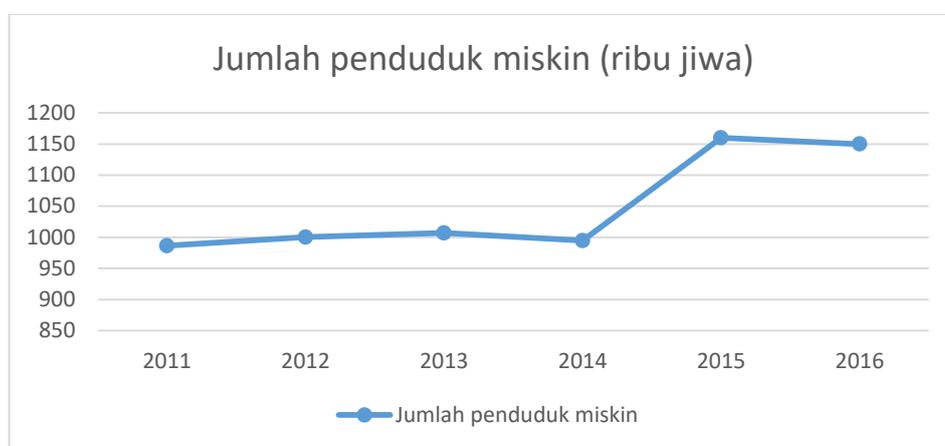
Tahun	Provinsi		
	BALI	NTB	NTT
2011	70,87	62,14	60,24
2012	71,62	62,98	60,81
2013	72,09	63,76	61,68
2014	72,48	64,31	62,26
2015	73,27	65,19	62,67
2016	73,65	65,81	63,13

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tenggara Indonesia yaitu Bali, NTB, dan NTT. Provinsi NTT masih tertinggal dengan rata-rata 61,79 persen yang mana rata-rata provinsi NTB sebesar 64,03 persen disusul provinsi Bali dengan ipm tertinggi dari ketiga provinsi tersebut sebesar 72,33 persen. Ini menunjukkan belum meratanya distribusi untuk pendidikan dan kesehatan yang ada di wilayah provinsi NTT.

Dan juga faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu kemiskinan, berikut tabel angka laju kemiskinan dari tahun 2011-2016 di provinsi NTT :

**Tabel Jumlah penduduk miskin provinsi NTT**



Sumber : BPS

Dari tabel diatas menunjukkan angka kenaikan kemiskinan naik pada tahun 2015-2016. Begitu juga yang disampaikan oleh kepala badan pusat statistik provinsi NTT bahwa jumlah penduduk miskin di NTT bertambah 160 orang dalam kurun waktu tujuh bulan. Pada bulan maret 2016 penduduk miskin di NTT 1.149.920 orang atau 22,01 persen menjadi 1.150.080 orang atau 22,19 persen pada September 2016 dari total penduduk 5,3 juta jiwa. Dengan data ini provinsi menempati urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia setelah provinsi Papua dan Papua Barat.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

### **Kajian pustaka**

Penelitian terdahulu dari Nadia, Istiqomah, et all (2012) melakukan penelitian Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. Hasil penelitian ini PDRB dan APBD untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negative terhadap IPM.

Penelitian terdahulu dari Mirza (2012) melakukan penelitian pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hasil penelitian ini kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM.

Penelitian terdahulu dari Muhammad Denny F (2018) melakukan penelitian Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan, PDRB perkapita, dan belanja modal dalam mempengaruhi IPM di Provinsi Papua. Hasil penelitian ini Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian terdahulu dari Jodi J (2016) melakukan penelitian Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Lampung. Hasil penelitian ini tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Realisasi anggaran sektor pendidikan, dan realisasi anggaran sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Penelitian terdahulu dari septian, teguh, et all (2015) melakukan penelitian pengaruh PDRB, Balanja Modal, dan kemiskinan terhadap Indeks pembangunan manusia (studi kasus : Eks. Karesidanan basuki). Hasil penelitian ini pengaruh pendapatan sectoral dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian terdahulu dari Sugiarto, Abubakar, et all (2013) melakukan penelitian analisis pengaruh pengeluaran pemerintah kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi aceh. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian terdahulu oleh Merang, et all (2016) melakukan penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kutai timur. Hasil dari penelitian ini pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM, namun pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

## **Landasan Teori**

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia (IPM) menghitung berdasarkan tiga dimensi yang pertama yaitu dimensi umur, kemudian dimensi manusia terdidik, dan terakhir dimensi standar hidup yang layak. Pada dimensi umur dalam menjalani hidup sehat diukur dengan usia harapan hidup, Selanjutnya dimensi manusia terdidik dapat diukur dengan tingkat kemampuan membaca dan menulis orang dewasa serta lamanya sekolah di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), serta dimensi standar hidup yang layak dapat diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM ini telah memadukan pendekatan kuantitas dan kualitas hidup masyarakat (Todaro dan Stephen C. Smith 2006).

Menurut badan pusat statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas

hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

### **Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan**

Dalam dasar hukum dan definisi anggaran pendidikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2017, pasal 1 angka 39 dan 40. Bunyi pasal 39 yaitu yang dimaksud dalam anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan dana alokasi anggaran pendidikan melalui pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan bunyi pasal 40 yaitu presentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

### **Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan**

Dalam melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karenanya, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. (Tjiptoherijanto,1989).

### **Kemiskinan**

Penyebab kemiskinan adalah pertama Secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, yang kedua yaitu kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia yang rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan, dan ketiga adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*) (Kuncoro,1997).

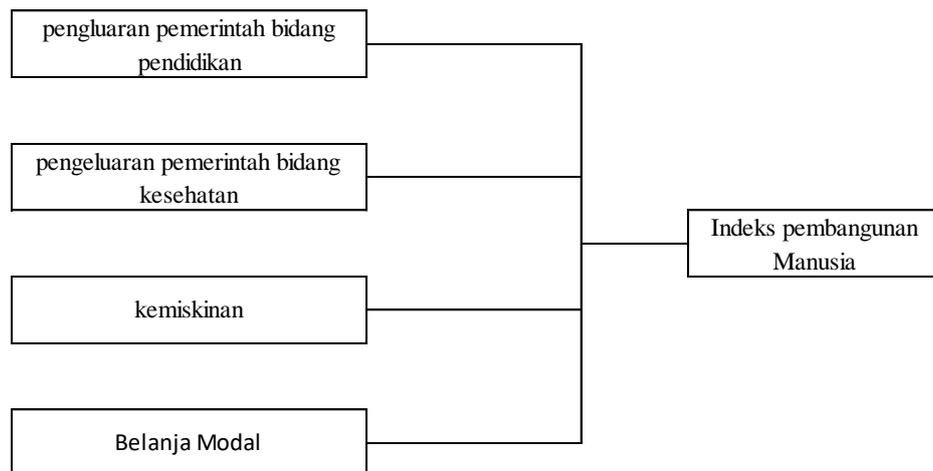
### **Belanja Modal**

Menurut PP No. 45 tahun 2013 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya. Kemudian menurut

peraturan menteri keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, bahwa anggaran dalam belanja modal hanya bisa digunakan untuk beberapa hal saja antara lain, Belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal lainnya, belanja modal badan layanan umum (BLU).

### **Kerangka pemikiran**

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya dan kajian teori dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



### **Hubungan Antar Variabel**

#### **Hubungan Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan IPM**

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang sudah tercantumkan dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang telah diamandemen IV. Dengan peraturan yang sah dan legal bahwa masyarakat harus diberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang cukup untuk menunjang mutu kualitas manusianya, sehingga sangat penting untuk pemerintah mengalokasikan dana ke dalam bidang pendidikan.

#### **Hubungan Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan IPM**

Pengeluaran pemerintah terutama pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi hak masyarakat yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan itu tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28H ayat 1 juga Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Atas demikian bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia.

#### **Hubungan Kemiskinan dengan IPM**

World Bank pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs), yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender,

perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dalam beberapa dimensi utama. Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (decrease in poverty), peningkatan kemampuan baca tulis (increase in literacy), penurunan tingkat kematian bayi (decrease in infant mortality), peningkatan harapan hidup (life expectancy) dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (decrease income inequality). Dengan pemikiran yang tertera tersebut bahwa pembangunan manusia dengan mengentaskan kemiskinan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

### **Hubungan Belanja Modal dengan IPM**

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah belanja modal di daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian belanja modal sangatlah penting untuk menunjang peningkatan sumberdaya manusia dan menjadikan kualitas hidup yang lebih sejahtera.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka dan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.
2. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.
3. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.
4. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.

### **METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diambil dengan metode data panel yang diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).. Dalam penelitian ini diperoleh data-data inflasi , Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan penduduk miskin . Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan alat software e-views 9. Data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y : Indeks Pembangunan Manusia (persen)

- X1 : Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan (miliar rupiah)
- X2 : Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan (miliar rupiah)
- X3 : Kemiskinan (ribu jiwa)
- X4 : Belanja Modal (miliar rupiah)
- $\beta_0$  : Intercept
- i : Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- t : Periode Waktu
- e : Error Term

Data panel dianalisis dengan menggunakan tiga model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Dari ketiga model tersebut, maka dapat dilakukan pengujian pertama untuk memilih model yang layak digunakan antara model *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dengan menggunakan uji Chow. Jika hasil uji chow ini signifikan (F-statistik > F-hitung atau P-value <  $\alpha$  0.05) maka model *Fixed effect* yang digunakan dan dilanjutkan ke model *Random Effect*, dan jika hasilnya tidak signifikan (F-statistik < F-hitung atau P-value >  $\alpha$  0.05) maka model yang layak digunakan yaitu *Common Effect* dan tidak perlu dilanjutkan ke model *Random Effect*.

Pengujian selanjutnya yaitu menguji antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model yang layak digunakan dalam estimasi akhir. Jika hasil uji Hausman signifikan (chi-sq statistik > chi-sq tabel atau P-value <  $\alpha$  0.05) maka model yang layak digunakan yaitu *Fixed Effect*, dan jika hasil uji hausman tidak signifikan (chi-sq statistik < chi-sq tabel atau P-value >  $\alpha$  0.05) maka model yang layak digunakan yaitu *Random Effect*.

Selain menggunakan tiga model analisis diatas, peneliti juga melakukan pengujian statistik diantaranya yaitu Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F-statistik), dan pengujian koefisien regresi secara individu (Uji t-statistik). Atas dasar beberapa uji yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji chow dan uji hausman, maka model *Random Effect* merupakan model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu *fixed Effect Model*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Chow Test

Tabel hasil Uji Chow Text

Effect test	Satistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	266,987333	(20,101)	0,000
Cross-section Chi-square	502,305434	20	0,000

Sumber : Eviews 9, diolah

Uji Chow Test ini digunakan untuk memilih manakah model yang tepat, yaitu membandingkan antara model regresi *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Dengan Hipotesis sebagai berikut :

H0 = *Common Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed Effect Model*

H1 = *Fixed Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*

Uji F-statistik ini akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas F-Statistik. Apabila Probabilitas F-Statistik tidak signifikan atau  $\alpha > 5\%$  maka model yang tepat untuk dipilih adalah *Common Effect Model*. Begitu juga sebaliknya, jika nilai probabilitas F-Statistik signifikan atau  $\alpha < 5\%$  maka model yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model*.

Dari hasil pengujian Uji Chow Test didapatkan hasil distribusi Chi-Square sebesar 502,305434 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau  $\alpha < 5\%$ , yang berarti menolak H0 dan memilih H1. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

### Uji Hausman Test

**Tabel hasil uji hausman test**

Test Summary	Chi-sq. statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9,609647	4	0,0475

Sumber : Eviews 9, Diolah

Uji Hausman ini bertujuan untuk menentukan model manakah yang cocok untuk digunakan yaitu antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 = *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed Effect Model*

H1 = *Fixed Effect Model* lebih baik dari pada *Random Effect Model*

Uji Hausman Test akan melihat dengan menggunakan nilai Probabilitas Chi-square statistik. Apabila Probabilitas Chi-Square Statistik atau  $\alpha < 5\%$ , maka yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*, namun jika sebaliknya jika nilai probabilitas Chi-Square statistik atau  $\alpha > 5\%$ , maka yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

Dilihat dari hasil yang didapatkan nilai Chi-Square yaitu sebesar 9,609647 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0475 atau  $\alpha > 5\%$ , yang artinya menolak H0 dan memilih H1. dikarenakan hal tersebut maka model yang tepat untuk dipilih yaitu *Fixed Effect Model*.

**Tabel hasil regresi Fixed Effect Model**

Variabel	Coefficient	std.Error	t-statistic	Prob.
C	49,24170	2,595077	18,97504	0,0000
LOG(PP?)	-1,2131667	0,226776	-5,351820	0,0000
LOG(PK?)	1,844770	0,298637	6,177309	0,0000
LOG(KEMISKINAN?)	0,320279	0,658734	0,486204	0,6279
LOG(BM?)	1,773217	0,237092	7,479023	0,0000
Fixed Effect (cross)				
_ALOR-C		-2,996031		
_BELU-C		-1,936780		

_ENDE-C	4,178247
_FLORESTIMUR-C	-0,173604
_KUPANG-C	0,366522
_LEMBATA-C	0,413890
_MANGGARAI-C	-1,770454
_SIKKA-C	4,308314
_NGADA-C	0,512354
_SUMBABARAT-C	-0,101827
_SUMBATIMUR-C	0,194863
_TTS-C	-2,465138
_TTU-C	-0,566004
_KTKUPANG-C	17,39665
_ROTENDAO-C	-2,465610
_MANGGARAI-C	-1,474975
_NAGEKEO-C	2,6876810
_SBD-C	-1,234481
_SUMTENG-C	-2,622394
_MANGGARAITIM-C	-4,278603
_SR-C	-7,966624
R-squared	0,983647
F-statistic	253,1319
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber : Eviews 9,diolah

Dari hasil akhir regresi *fixed effect model* diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,983647 artinya bahwa variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, kemiskinan, dan belanja modal sebesar 98,36% sedangkan sisanya 1,64% disebabkan dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Dari hasil akhir regresi *Fixed Effect Model* diperoleh nilai f-statistik sebesar 253,1319 dengan probabilitas sebesar 0,000000 ( $< \alpha = 5\%$ ). Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2), kemiskinan (X3), dan belanja modal (X4) secara bersama-sama serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM).

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan t-hitung -5,351820. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempunyai nilai probabilitas sebesar

0,0000 dengan t-hitung 6,177309. Bisa disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,6279 dengan t-hitung 0,486204. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), belanja modal pemerintah mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan t-hitung 7,479023. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

## **Intrepretasi hasil dan pembahasan**

### **Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM**

Hasil estimasi *fixed effect model* pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menghasilkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien yaitu sebesar -1,213667. yang artinya apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami kenaikan 1% maka akan menurunkan hasil nilai indeks pembangunan manusia sebesar 1,213667. hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam kenyataanya masyarakat NTT masih belum mendapatkan kualitas pendidikan yang optimal dilihat dari BPS NTT untuk presentase penduduk laki-laki dan perempuan berumur 10 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis. Dan juga angka partisipasi sekolah antara umur 7-12 tahun masih rendah, jadi bisa dikatakan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan provinsi NTT maingkat atau naik belum tentu akan menaikan nilai indeks pembangunan manusia.

### **Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM**

Hasil estimasi *fixed effect model* pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien yaitu sebesar 1,844770, hal ini sesuai dengan hipotesis awal, apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik sebesar 1% maka akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia sebesar 1,844770. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal. Hasil ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh nadia, istiqomah, et all (2012) dengan alasannya yaitu dengan adanya alokasi khusus untuk kesehatan yang berasal dari APBD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan manusia karena kesehatan berkaitan dengan produktivitas.

### **Analisis pengaruh Kemiskinan terhadap IPM**

Hasil estimasi *fixed effect model* kemiskinan menghasilkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien kemiskinan yaitu sebesar 0,320279. Dengan hasil ini maka variabel kemiskinan tidak

berpengaruh untuk menaikkan nilai indeks pembangunan manusia. Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian septian, teguh, et all (2015).

Masyarakat NTT sampai sekarang ini masih memegang teguh tradisi nilai-nilai para leluhur mereka, hal itu bisa dilihat dari kebiasaan ritual mereka yang lebih memilih kebutuhan sekunder dari pada kebutuhan dasar, sandang pangan dan papan, ketika bercocok tanam masyarakat melakukan ritual adat terlebih dahulu, dengan itu membuat masyarakat hanya bercocok tanam pada musim hujan. Padahal untuk bercocok tanam zaman sekarang bisa dilakukan dengan teknologi yang diperuntukan untuk pertanian. Selain itu untuk acara penguburan orang yang sudah meninggal dapat menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, mereka bias menghabiskan kerbau, sapi, atau kuda yang padahal hewan-hewan tersebut mempunyai nilai jual atau untuk produktivitas setiap hari agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **Analisis pengaruh Belanja Modal terhadap IPM**

Hasil estimasi fixed effect model belanja modal pemerintah menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 1,773217, dengan arti apabila belanja modal pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 1,773217, maka bisa dikatakan bahwa ada pengaruhnya alokasi belanja modal pemerintah dalam membantu menaikkan nilai indeks pembangunan manusia. Begitu juga dengan hasil penelitian Mirza (2012) yang menjelaskan bahwa variabel belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dengan alasan belanja modal pemerintah sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan yang mendasar.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan alat bantu eviews 9, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PP) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Variabel Kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Variabel Belanja Modal berpengaruh Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **Implikasi**

1. Dalam penelitian ini menunjukn bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan balanja modal berpengaruh positif terhadap IPM, oleh karena itu pemerintah tetap menganggarkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat yang mana terdapat dalam UU No.36 tahun 2009 bahwa anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN diluar gaji. Sehingga dapat memberikan fasilitas kesehatan dan kebutuhan puskesmas disetiap daerah terpencil bisa terpenuhi, dan itu akan sesuai dengan indikator untuk meningkatkan IPM.

2. Disamping itu pemerintah juga harus berperan aktif dalam menanggulangi masalah pendidikan karena kualitas manusia bisa dilihat dari seberapa besar masyarakat yang melek huruf, dari berbagai sumber yang ada bahwa mutu pendidikan di provinsi NTT masih terbilang buruk, bila dilihat dari anak usia 7-12 tahun yang tidak lagi melanjutkan sekolah. Oleh karena itu pemerintah harus lebih giat lagi untuk mengalokasikan dananya untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk seluruh daerah yang ada di NTT, Dengan meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas maka masyarakat akan semakin cerdas dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tidak menyalahkan adat istiadat yang masyarakat pegang secara turun temurun, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk mementingkan kebutuhan pokok dasar mereka. Selanjutnya masyarakat diberikan dana dan juga pelatihan berwirausaha dalam bentuk program dana desa mandiri untuk menjalankan usaha mikro kecil dan menengah, selain itu pemerintah bisa memberikan alokasi dana untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan menjadikan sebagai sektor pariwisata, karena provinsi NTT banyak dengan pantai yang masih alami dan berpotensi untuk dijadikan daerah pariwisata, dengan begitu masyarakat akan mendapatkan pendapatan lebih dan roda perekonomian akan berjalan dengan baik.
4. Selain itu karena NTT berbatasan langsung dengan negara timor leste maka perlunya dibangun akses atau infrastruktur yang memadai dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan produktivitas mereka karena akses dari daerah satu ke daerah lainnya terhubung, sehingga akan menambah pendapatan mereka, dengan menambah pendapatan mereka otomatis perekonomian akan semakin berkembang. dan juga NTT terdapat sektor pariwisata yang bisa dikembangkan lebih serius lagi yaitu pulau komodo, dengan begitu masyarakat akan dapat merasakan dampaknya ketika pemerintah serius untuk sektor pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2018). Indeks Pembangunan manusia. Diakses pada 14 Maret 2018. Dari <http://www.bps.go.id>
- \_\_\_\_\_ (2018). Kemiskinan. Diakses pada 14 Maret 2018. Dari <http://www.ntt.bps.go.id>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Database, diakses pada 19 maret 2018, dari [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316).
- Esmara. (1986). *Sumber daya manusia, kesempatan kerja dan perkembangan ekonomi*. UI Press, Jakarta.
- Jodi J. (2016). “Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi lampung”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Kompasiana (2017) Fenomena budaya sebagai penyebab kemiskinan di NTT. Diakses pada tanggal 29 maret 2018, dari, [https://www.kompasiana.com/yasintus/fenomena-budaya-sebagai-penyebab-kemiskinan-di-ntt\\_59223af71d23bd9a545e6fdd](https://www.kompasiana.com/yasintus/fenomena-budaya-sebagai-penyebab-kemiskinan-di-ntt_59223af71d23bd9a545e6fdd)
- Kuncoro ,Mudrajad. (1997). *Ekonomi pembangunan, teori masalah dan kebijakan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Merang, et all. (2016). “Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol.18 (2).
- Muhammad Deny F. (2018). “Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan, PDRB perkapita, Belanja Modal dalam mempengaruhi tingkat IPM di Provinsi Papua”. Skripsi Sarjana (tidak di publikasikan), Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Miller, Herman P. (1971), “Rich Man, Poor Man”, Thomas Y. Crowell Co.
- Mirza, Denni S. (2012), “Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di jawa tengah tahun 2006-2009”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol.1.
- Nadia , istiqomah, et all. (2012). “Anslisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012”. *Ekuitas : Jurnal ekonomi dan keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013, tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara .
- Septian, teguh, et all. (2015). “Pengaruh PDRB, Belanja modal dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (studi kasus : eks karesidenan Besuki)”. *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Jember*.

- Sugiarto, Abubakar, et all (2013). “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern : Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*. PT. Raja grafindo pustaka, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, P. (1989). *Untaian pembangunan sumberdaya manusia*. BPFE UI. Jakarta.
- Todaro, Michael P. (1987). *Pembangunan ekonomi dunia ketiga*. BPFE UI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Pembangunan ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- The Word Bank (2017) Indonesia human development index rises but inequality remains, Jakarta. Dari <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen IV pasal 31 ayat 4, Bab pendidikan dan kebudayaan.
- Undang-undang peraturan kementerian keuangan nomor 36 tentang Anggaran kesehatan.
- Undang-undang peraturan kementerian keuangan nomor 18, pasal 1 angka 39 dan 40, tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Undang-undang peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.02/2011, tentang klasifikasi anggaran.
- Widarjono, A. (2016) . *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai penduan Eviews* (4<sup>th</sup> ed.),UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Sritomo. (1995). “Ergonomi, Studi gerak dan waktu. Teknik analisis untuk peningkatan produktivitas kerja, edisi pertama”, PT. Guna Widya. Jakarta.